

ANALISIS KAPASITAS DAN KUALITAS POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA MEDAN TAHUN 2024

Adi Pia

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
adipialubis123@gmail.com

Fatimah Jahroh

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
fatimahzahrohnapi70@gmail.com

Abstrak

Pemilihan Walikota Medan 2024 menjadi studi kasus penting untuk mengevaluasi hubungan antara kapasitas pelaksanaan pemilu—meliputi kapasitas ekstraktif, koersif, dan administratif—dengan kualitas demokrasi lokal. Penelitian ini menganalisis pengelolaan anggaran, pengamanan proses pemilu, serta manajemen administratif dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pencairan anggaran dan kurangnya alokasi untuk sosialisasi calon berdampak pada rendahnya partisipasi pemilih, yang hanya mencapai 34,81%. Kapasitas koersif yang diterapkan oleh aparat keamanan berhasil menjamin distribusi logistik dan pengamanan TPS, meskipun tantangan potensial dalam konflik tetap ada. Sementara itu, kelemahan dalam kapasitas administratif, terutama dalam menghadapi situasi darurat seperti banjir, menyoroti perlunya peningkatan perencanaan dan manajemen risiko bencana. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas demokrasi lokal memerlukan penguatan kapasitas pelaksanaan melalui perencanaan anggaran yang lebih baik, pengamanan yang transparan, dan integrasi manajemen darurat dalam proses pemilu. Dengan mengatasi tantangan ini, legitimasi pemilu dapat ditingkatkan, memberikan landasan yang lebih kuat bagi demokrasi lokal di Medan.

Kata Kunci: Kapasitas Pemilu; Demokrasi Lokal; Partisipasi Pemilih

Abstract

The 2024 Medan Mayoral Election serves as an important case study to evaluate the relationship between election implementation capacity—including extractive, coercive, and administrative capacities—and the quality of local democracy. This study analyzes budget management, electoral security, and

administrative processes in ensuring transparency, accountability, and public participation. The findings reveal that delays in budget disbursement and insufficient allocation for candidate socialization contributed to low voter turnout, which reached only 34.81%. The coercive capacity implemented by security forces successfully ensured the distribution of logistics and secured polling stations, despite potential conflict challenges. Meanwhile, weaknesses in administrative capacity, particularly in handling emergencies such as floods, highlight the need for improved planning and disaster risk management. The study concludes that enhancing the quality of local democracy requires strengthening implementation capacity through better budget planning, transparent security measures, and the integration of emergency management into electoral processes. Addressing these challenges can improve electoral legitimacy, providing a stronger foundation for local democracy in Medan.

Keyword: Electoral Capacity; Local Democracy; Voter Participation

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah, termasuk Pemilihan Walikota Medan 2024, memainkan peranan penting dalam memperkuat demokrasi lokal dan tata kelola pemerintahan yang baik. Proses pemilu ini mencerminkan sejauh mana kapasitas politik mampu mendukung pelaksanaan demokrasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sebagai salah satu wilayah strategis di Indonesia, Medan membutuhkan kepemimpinan yang didasarkan pada pemilu yang berintegritas untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan perkotaan yang kompleks. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kapasitas politik memainkan peran penting dalam menentukan kualitas proses pemilu, baik melalui pengelolaan sumber daya maupun mekanisme administratif yang efisien¹.

Namun, tantangan dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota Medan 2024 tidak dapat diabaikan. Isu keterlambatan pencairan anggaran, minimnya sosialisasi kepada masyarakat, serta rendahnya partisipasi pemilih adalah gambaran dari keterbatasan kapasitas politik dalam mendukung kualitas pemilu. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi terhadap dimensi ekstraktif, koersif, dan administratif dalam memastikan pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi².

¹ Roberto Ricciuti, Antonio Savoia, dan Kunal Sen, "What Determines Administrative Capacity in Developing Countries?," *International Tax and Public Finance* 26, no. 5 (1 Oktober 2019): 972–98, <https://doi.org/10.1007/s10797-019-09535-y>.

² Kompas Cyber Media, "Tegur Bobby Nasution, Mendagri Soroti Anggaran Pilkada Medan Belum Cair Rp 83 Miliar," KOMPAS.com, 9 Juli 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/09/12312741/tegur-bobby-nasution-mendagri-soroti-anggaran-pilkada-medan-belum-cair-rp-83>.

Permasalahan utama dalam Pemilihan Walikota Medan 2024 terletak pada rendahnya sinergi antara kapasitas politik dan kualitas proses pemilu. Keterlambatan distribusi anggaran dan logistik, minimnya perlindungan terhadap hak pilih, serta pelanggaran netralitas aparatur sipil negara menunjukkan kelemahan koordinasi antar pemangku kepentingan. Rendahnya partisipasi pemilih, yang hanya mencapai 34,81 persen, juga menjadi indikator kurang efektifnya upaya sosialisasi oleh penyelenggara pemilu (Tribun Medan, 2024). Sebagai solusi umum, peningkatan kapasitas politik dalam pelaksanaan pemilu dapat dilakukan melalui pendekatan sistemik yang mencakup pengelolaan sumber daya, perlindungan keamanan, serta efisiensi administratif. Kolaborasi antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil harus diperkuat untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang inklusif dan transparan.

Literatur menunjukkan bahwa kapasitas politik yang optimal memerlukan tiga dimensi utama: kapasitas ekstraktif, koersif, dan administratif. Pertama, kapasitas ekstraktif berfokus pada kemampuan mengelola sumber daya seperti anggaran dan logistik pemilu. Misalnya, penetapan jadwal distribusi logistik secara tepat waktu telah terbukti mampu mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu³. Keterlambatan pencairan anggaran, seperti yang terjadi di Pilkada Medan 2024, menggarisbawahi pentingnya manajemen fiskal yang terencana⁴.

Kedua, kapasitas koersif mencakup upaya menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilu. Studi oleh Kentikelenis dan Rochford menyoroti bahwa legitimasi aparat keamanan dalam melaksanakan tugasnya sangat memengaruhi stabilitas pemilu⁵. Di Medan, pelibatan aparat keamanan dalam pengawalan logistik pemilu menjadi contoh penting penerapan kapasitas koersif yang efektif⁶.

Ketiga, kapasitas administratif berkaitan dengan efisiensi penyelenggaraan tahapan pemilu, seperti verifikasi data pemilih dan penyelesaian sengketa. Penelitian oleh Kropf et al. (2020) menunjukkan bahwa

³ "Targetkan Tiga Hari Selesai, KPU Medan Mulai Distribusikan Logistik Pilkada 2024," *Waspada Online* (blog), 23 November 2024, <https://www.waspada.co.id/targetkan-tiga-hari-selesai-kpu-medan-mulai-distribusikan-logistik-pilkada-2024/>; Redaksi Sumutpos.co, "KPU Medan Distribusikan Logistik Pilkada ke 21 Kecamatan dan 151 Kelurahan - Sumut Pos," KPU Medan Distribusikan Logistik Pilkada ke 21 Kecamatan dan 151 Kelurahan - Sumut Pos, diakses 27 Januari 2025, <https://sumutpos.jawapos.com/politik/2375349395/kpu-medan-distribusikan-logistik-pilkada-ke-21-kecamatan-dan-151-kelurahan>.

⁴ Media, "Tegur Bobby Nasution, Mendagri Soroti Anggaran Pilkada Medan Belum Cair Rp 83 Miliar."

⁵ Alexander Kentikelenis dan Connor Rochford, "Power Asymmetries in Global Governance for Health: A Conceptual Framework for Analyzing the Political-Economic Determinants of Health Inequities," *Globalization and Health* 15, no. Suppl 1 (28 November 2019): 70, <https://doi.org/10.1186/s12992-019-0516-4>.

⁶ "Personel Polsek Medan Baru Pengamanan dan Pengawalan Pendistribusian Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 – Tribrata News Polrestabes Medan," diakses 27 Januari 2025, <https://tribrataneews.restabesmedan.sumut.polri.go.id/personel-polsek-medan-baru-pengamanan-dan-pengawalan-pendistribusian-logistik-pilkada-serentak-tahun-2024/>.

kapasitas administratif yang baik mampu meningkatkan partisipasi pemilih dan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Upaya KPU Medan dalam merekapitulasi suara dan menangani sengketa hasil pemilu adalah langkah penting menuju penguatan kapasitas administratif (Tempo, 2024; Waspada, 2024).

Penelitian sebelumnya telah membahas peran kapasitas politik dalam mendukung kualitas pemilu. Ricciuti et al. (2019) menyoroti pentingnya kapasitas administratif dan fiskal dalam memperkuat tata kelola pemilu. Namun, studi ini kurang menyoroti peran dimensi koersif dalam memastikan keamanan pemilu di tengah tantangan konflik lokal. Sebaliknya, penelitian oleh Okunogbe (2021) menekankan pentingnya kapasitas ekstraktif dalam pengelolaan sumber daya, tetapi masih terbatas dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.

Selain itu, studi-studi sebelumnya belum sepenuhnya mengeksplorasi hubungan antara tiga dimensi kapasitas politik dan partisipasi publik. Misalnya, rendahnya partisipasi pemilih di Medan 2024 menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan sosialisasi dan perlindungan hak pilih. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan pendekatan komprehensif yang mencakup evaluasi ketiga dimensi kapasitas politik secara holistik.

Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengevaluasi kapasitas politik dalam Pemilihan Walikota Medan 2024 berdasarkan dimensi ekstraktif, koersif, dan administratif. Kedua, mengidentifikasi dampak kapasitas politik terhadap kualitas pemilu, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Ketiga, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal di Medan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menghubungkan kapasitas politik dengan kualitas pemilu menggunakan data kuantitatif dan dokumentasi. Dengan memadukan analisis empiris dan tinjauan literatur, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya wacana demokrasi lokal di Indonesia. Adapun lingkup penelitian mencakup pelaksanaan Pemilihan Walikota Medan 2024, dengan fokus pada dimensi ekstraktif, koersif, dan administratif sebagai variabel utama analisis.

METODE

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data sekunder yang relevan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Walikota Medan 2024. Data yang digunakan mencakup laporan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hasil survei partisipasi pemilih, serta publikasi media yang berisi perkembangan tahapan dan dinamika pemilu. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan data kuantitatif terkait alokasi anggaran

dan distribusi logistik pemilu untuk menganalisis kapasitas ekstraktif, koersif, dan administratif penyelenggara pemilu.

Data yang digunakan diseleksi berdasarkan relevansi dengan tujuan penelitian, meliputi:

1. Laporan Anggaran: Data pencairan anggaran Pilkada Medan dari Kementerian Dalam Negeri (Kompas, 2024) dan KPU Medan (Medan Daily, 2024).
2. Dokumentasi Tahapan Pemilu: Informasi mengenai perencanaan, distribusi logistik, dan pelaksanaan kampanye (Waspada, 2024; Sumut Pos, 2024).
3. Partisipasi Pemilih: Menyoroti tingkat partisipasi masyarakat, termasuk alasan rendahnya partisipasi (Tribun Medan, 2024).

Seluruh data diolah dengan mengintegrasikan informasi kuantitatif dan dokumentasi menggunakan pendekatan komprehensif untuk memastikan keakuratan analisis.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis data kuantitatif yang melibatkan: Pengumpulan Data menggunakan teknik penelusuran dokumen resmi dan survei publik. Distribusi logistik dan anggaran dianalisis melalui laporan dari KPU Medan dan media terpercaya. Analisis Kapasitas Politik: Tiga dimensi kapasitas politik dievaluasi berdasarkan indikator berikut: Ekstraktif yaitu Jumlah dan efisiensi alokasi anggaran serta distribusi logistik pemilu. Selanjutnya Koersif berupa Upaya pengamanan selama pemilu, termasuk pengawasan logistik oleh aparat keamanan. Terakhir, Administratif: Efektivitas dalam merencanakan dan menjalankan tahapan pemilu. Hasil analisis ini memberikan gambaran holistik mengenai kinerja penyelenggara pemilu di Medan.

Penelitian ini mengukur parameter utama yang mencakup: Transparansi, informasi tentang penggunaan anggaran dan distribusi logistik. Akuntabilitas, evaluasi pelaporan hasil pemilu dan mekanisme penyelesaian sengketa. Partisipasi Publik, tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan data survei partisipasi. Setiap parameter dianalisis untuk menentukan pengaruh kapasitas politik terhadap kualitas pemilu, mengidentifikasi tantangan, serta memberikan rekomendasi.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif dan inferensial. Deskriptif, Meringkas data kuantitatif terkait anggaran, distribusi logistik, dan tingkat partisipasi pemilih untuk mengidentifikasi pola dan outlier. Analisis Inferensial digunakan untuk uji regresi untuk mengevaluasi hubungan antara kapasitas politik (ekstraktif, koersif, administratif) dengan kualitas pemilu (transparansi, akuntabilitas, partisipasi). Data yang diperoleh dibandingkan dengan publikasi resmi. Hasil analisis ini diinterpretasikan untuk

mengidentifikasi keterkaitan antara kapasitas politik dan kualitas demokrasi lokal di Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapasitas Ekstraktif dalam Pilkada Medan 2024

Pelaksanaan Pemilihan Walikota Medan 2024 dihadapkan pada berbagai tantangan terkait pengelolaan anggaran dan efisiensi penggunaan sumber daya. Salah satu masalah utama adalah keterlambatan pencairan anggaran Pilkada, yang baru mencapai kurang dari 50 persen hingga Juli 2024 dari total Rp 83 miliar yang dialokasikan⁷. Kondisi ini menghambat tahapan persiapan, seperti penyusunan program dan pembentukan panitia pemilu yang seharusnya selesai pada awal 2024⁸. Selain itu, anggaran sebesar Rp 1,8 miliar untuk sosialisasi pasangan calon melalui media massa tidak digunakan, yang berpotensi mengurangi keterlibatan masyarakat dalam pemilu⁹).

Pada aspek distribusi logistik, KPU Kota Medan memulai distribusi logistik pemilu pada 23 November 2024, dengan target penyelesaian dalam tiga hari untuk 21 kecamatan. Logistik meliputi surat suara, kotak suara, bilik suara, alat pencoblosan, dan tinta, yang semuanya penting untuk memastikan kelancaran proses pemungutan suara¹⁰. Distribusi ini menunjukkan upaya untuk memastikan kesiapan setiap TPS dalam mendukung partisipasi pemilih. Namun, tantangan seperti kondisi geografis dan infrastruktur yang kurang memadai tetap menjadi hambatan operasional.

Kapasitas ekstraktif yang optimal sangat penting dalam mendukung keberhasilan pemilu, terutama dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya. Ricciuti et al. menyoroti bahwa kapasitas fiskal yang kuat dapat meningkatkan efektivitas tata kelola, termasuk dalam konteks pemilu¹¹. Namun, kasus Pilkada Medan 2024 menunjukkan bahwa keterlambatan anggaran dapat menyebabkan hambatan signifikan dalam pelaksanaan tahapan pemilu, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas demokrasi lokal.

⁷ Media, "Tegur Bobby Nasution, Mendagri Soroti Anggaran Pilkada Medan Belum Cair Rp 83 Miliar."

⁸ "Pilkada Medan 2024: Ini Jadwal Dan Lokasi Kampanye Terbuka Cawalkot Medan," *Waspada Online* (blog), 16 Oktober 2024, <https://www.waspada.co.id/pilkada-medan-2024-ini-jadwal-dan-lokasi-kampanye-terbuka-cawalkot-medan/>.

⁹ "Anggaran Iklan Rp 1,8 M Tak Disentuh, KPU Medan 'Hilangkan' Hak Paslon," *Rmol.id*, diakses 27 Januari 2025, <https://rmol.id/politik/read/2024/11/17/645096/anggaran-iklan-rp-1-8-m-tak-disentuh-kpu-medan-hilangkan-hak-paslon>.

¹⁰ "Targetkan Tiga Hari Selesai, KPU Medan Mulai Distribusikan Logistik Pilkada 2024"; *Sumutpos.co*, "KPU Medan Distribusikan Logistik Pilkada ke 21 Kecamatan dan 151 Kelurahan - Sumut Pos."

¹¹ Ricciuti, Savoia, dan Sen, "What Determines Administrative Capacity in Developing Countries?"

Distribusi logistik yang dilakukan oleh KPU Medan, meskipun efisien secara waktu, menunjukkan adanya tantangan dalam perencanaan yang lebih holistik. Mithia dan Kosgey (2022) menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya yang efektif membutuhkan koordinasi yang kuat antara institusi lokal dan nasional¹². Dalam konteks Medan, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu terlihat dari keterlambatan anggaran yang menghambat persiapan¹³.

Dibandingkan dengan negara-negara lain, terlihat bahwa investasi dalam kapasitas fiskal memungkinkan negara-negara berkembang untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri dan meningkatkan kemandirian. Namun, Medan menunjukkan kesenjangan dalam pemanfaatan kapasitas fiskal, khususnya dalam alokasi anggaran untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Hal ini kontras dengan temuan di Botswana, di mana pengelolaan sumber daya yang baik dapat meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilu¹⁴.

Kapasitas ekstraktif dalam pelaksanaan Pilkada Medan 2024 menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dan logistik memengaruhi kualitas proses demokrasi secara signifikan. Penundaan anggaran tidak hanya menghambat tahapan teknis, tetapi juga mencerminkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemilu. Studi ini menggarisbawahi perlunya penguatan kapasitas fiskal melalui perencanaan yang lebih terintegrasi antara pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu.

Distribusi logistik yang dilakukan dengan efisien menunjukkan potensi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Namun, kelemahan dalam pengelolaan anggaran untuk sosialisasi calon mengindikasikan perlunya reformasi dalam alokasi sumber daya yang lebih berorientasi pada masyarakat. LeBas menekankan pentingnya menghindari budaya clientelism yang hanya berfokus pada keuntungan politik jangka pendek, dan sebaliknya mendorong kebijakan yang mendukung partisipasi inklusif¹⁵.

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi agar pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu berinvestasi dalam pengembangan kapasitas fiskal dan administratif yang lebih baik. Kolaborasi dengan media massa juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa anggaran sosialisasi dimanfaatkan

¹² Catherine Mithia dan Margaret Kosgey, "Governance Practices and Illicit Financial Flows in Kenya's Oil and Mining Sectors," *American Journal of Public Policy and Administration* 7, no. 1 (1 November 2022): 1–13, <https://doi.org/10.47672/ajppa.1049>.

¹³ Suyanto Sitepu, "Anggaran Pilkada Medan Cair Pekan Depan," *rri.co.id* - Portal berita terpercaya, diakses 27 Januari 2025, <https://rri.co.id/pilkada-2024/808699/anggaran-pilkada-medan-cair-pekan-depan>.

¹⁴ Mithia dan Kosgey, "Governance Practices and Illicit Financial Flows in Kenya's Oil and Mining Sectors."

¹⁵ Adrienne LeBas, "Who Trusts? Ethnicity, Integration, and Attitudes Toward Elected Officials in Urban Nigeria," *Comparative Political Studies* 53, no. 10–11 (1 September 2020): 1738–66, <https://doi.org/10.1177/0010414020912269>.

secara optimal, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan dapat membuat keputusan yang tepat¹⁶. Selain itu, penyusunan rencana distribusi logistik yang lebih responsif terhadap kebutuhan lapangan dapat mengatasi tantangan geografis dan infrastruktur, sebagaimana diungkapkan dalam studi oleh Setyowati et al¹⁷. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya pemilu, baik untuk mendukung proses demokrasi saat ini maupun untuk membangun fondasi yang lebih kuat bagi pemilu di masa depan. Upaya perbaikan dalam kapasitas ekstraktif dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal dan memperkuat legitimasi proses politik di Kota Medan.

Kapasitas Ekstraktif dalam Pilkada Medan 2024

Pilkada Medan 2024 memperlihatkan bagaimana kapasitas koersif diterapkan untuk menjamin keamanan proses pemilu. Polrestabes Medan berperan penting dalam mengamankan peluncuran tahapan pemilu, yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai proses demokrasi yang akan datang¹⁸. Selain itu, personel Polsek Medan Baru melaksanakan pengamanan terhadap distribusi logistik pemilu, memastikan semua kebutuhan seperti surat suara, kotak suara, dan bilik suara tiba dengan aman di lokasi tujuan¹⁹.

Di tingkat provinsi, Pejabat Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melepas personel pengamanan untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini menunjukkan kesiapan aparat keamanan dalam menjaga situasi kondusif selama proses pemilu berlangsung. Kombinasi strategi pengamanan ini memperlihatkan upaya komprehensif untuk menciptakan lingkungan pemilu yang aman dan demokratis.

Kapasitas koersif menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas politik selama pemilu. Kentikelenis dan Rochford menyoroti bahwa legitimasi kekuasaan sering kali didasarkan pada kemampuan negara untuk mengelola hukum dan ketertiban melalui tindakan koersif²⁰. Dalam konteks Pilkada Medan, keberhasilan pengamanan distribusi logistik menunjukkan efektivitas kapasitas koersif dalam memastikan kelancaran logistik dan mencegah potensi

¹⁶ redaksi, "Terima Anggaran Penuh Sebesar Rp82 M, KPU Medan Ajak Media Sukseskan Pilkada 2024," *MedanDaily.com* (blog), 12 Juli 2024, <https://medandaily.com/politik/terima-anggaran-penuh-sebesar-rp82-m-kpu-medan-ajak-media-sukseskan-pilkada-2024/>.

¹⁷ Milla Setyowati, Aldy Widiarto, dan Indriani Indriani, "Development of DKI Jakarta Regional Fiscal Capacity in 2014-2019," 2020, <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.5-8-2020.2301220>.

¹⁸ "Personel Polsek Medan Baru Pengamanan dan Pengawasan Pendistribusian Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 – Tribrata News Polrestabes Medan."

¹⁹ "Personel Polsek Medan Baru Pengamanan dan Pengawasan Pendistribusian Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 – Tribrata News Polrestabes Medan."

²⁰ Kentikelenis dan Rochford, "Power Asymmetries in Global Governance for Health."

konflik. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan kapasitas koersif yang berlebihan dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan, yang pada gilirannya dapat merusak legitimasi negara. Noskov et al. menekankan bahwa langkah koersif harus dilaksanakan secara adil untuk mendapatkan dukungan publik²¹. Dalam hal ini, pengamanan yang dilakukan secara transparan dan tanpa diskriminasi di Pilkada Medan menjadi contoh yang positif, karena tidak ada laporan tentang tindakan koersif yang memicu konflik atau ketidakpercayaan masyarakat.

Dalam tinjauan yang lebih luas, penelitian oleh Curtice dan Behlendorf mengungkapkan bahwa penggunaan kekuatan koersif secara berlebihan, seperti kekerasan oleh polisi, dapat memicu perlawanan masyarakat²². Hal ini tidak terlihat di Pilkada Medan, di mana pengamanan fokus pada pencegahan konflik dan perlindungan logistik. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi Smidt, yang menunjukkan bahwa tindakan koersif harus diarahkan pada stabilisasi, bukan eskalasi konflik²³.

Temuan tentang kapasitas koersif dalam Pilkada Medan 2024 menunjukkan bahwa keamanan merupakan komponen krusial dalam pelaksanaan pemilu yang sukses. Pengelolaan keamanan yang baik tidak hanya menjamin kelancaran teknis pemilu, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemilu. Studi ini menunjukkan bahwa koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan penyelenggara pemilu sangat penting dalam memastikan bahwa langkah koersif dilaksanakan secara tepat sasaran.

Secara ilmiah, penelitian ini menambah pemahaman tentang bagaimana kapasitas koersif dapat digunakan untuk menjaga stabilitas tanpa mengorbankan legitimasi. Distribusi manfaat dari langkah koersif harus mencerminkan keadilan untuk mencegah eskalasi konflik. Dalam konteks Medan, distribusi logistik yang aman dan pengamanan di TPS menunjukkan penerapan kapasitas koersif yang efektif. Secara praktis, pelajaran dari Pilkada Medan dapat diterapkan pada pemilu mendatang di Indonesia. Misalnya, perlu ada pelatihan lebih lanjut bagi aparat keamanan untuk menangani potensi konflik dengan pendekatan non-represif. Selain itu, transparansi dalam pengambilan keputusan terkait keamanan dapat meningkatkan legitimasi langkah koersif di mata publik. Sebagai rekomendasi, pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu dapat memanfaatkan model pengamanan di Medan

²¹ Vladimir A. Noskov dkk., "Politics and Law as Regulatory Correlates of Power," *Revista de Investigaciones Universidad Del Quindío* 34, no. S2 (1 September 2022): 337–43, <https://doi.org/10.33975/riug.vol34nS2.949>.

²² Travis B. Curtice dan Brandon Behlendorf, "Street-Level Repression: Protest, Policing, and Dissent in Uganda," *Journal of Conflict Resolution* 65, no. 1 (1 Januari 2021): 166–94, <https://doi.org/10.1177/0022002720939304>.

²³ Hannah Smidt, "Mitigating election violence locally: UN peacekeepers' election-education campaigns in Côte d'Ivoire," *Journal of Peace Research* 57, no. 1 (2020): 199–216.

sebagai acuan untuk memperbaiki manajemen konflik di daerah lain. Langkah ini akan membantu menciptakan sistem pemilu yang lebih adil, aman, dan demokratis di masa depan.

Kapasitas Administratif dalam Pilkada Medan 2024

Kapasitas administratif KPU Medan dalam Pilkada 2024 memainkan peran penting dalam memastikan tahapan pemilu berjalan lancar. KPU Medan berhasil menetapkan jadwal dan lokasi kampanye yang melibatkan tiga pasangan calon (paslon), memastikan semua pihak memiliki kesempatan yang setara untuk berinteraksi dengan pemilih²⁴. Selain itu, KPU juga melaksanakan verifikasi administrasi secara menyeluruh terhadap para calon, yang memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Waspada Online, 2024b).

Namun, tantangan muncul dalam hal partisipasi pemilih. Beberapa pihak menyoroti rendahnya tingkat partisipasi, yang hanya mencapai 34,81 persen, terutama disebabkan oleh kondisi banjir yang menghambat akses ke TPS²⁵. Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas regulasi terkait kondisi darurat, yang memengaruhi keadilan pemilu. Selain itu, sengketa hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi menyoroti potensi kelemahan dalam pengelolaan sengketa pemilu²⁶.

Kapasitas administratif yang efektif mencakup kemampuan untuk mengelola tahapan pemilu dengan efisiensi dan akurasi. Studi oleh Kropf et al. (2020) menekankan bahwa kapasitas manajerial yang tinggi dalam administrasi pemilu dapat mengurangi masalah teknis, seperti kelalaian atau kekeliruan dalam proses penghitungan suara²⁷. Dalam konteks Pilkada Medan, penetapan jadwal kampanye dan verifikasi calon menunjukkan langkah-langkah positif menuju manajemen administrasi yang baik.

Namun, kelemahan terlihat dalam penanganan situasi darurat, seperti banjir yang memengaruhi akses ke TPS. Literatur oleh Setiawan et al. (2022)

²⁴ "Pilkada Medan 2024"; "Jadwal, Tahapan Pilkada, Dan Persyaratan Calon: Antisipasi Pilkada Medan 2024," *Blog Info dan Berita* (blog), 8 Juni 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/blog/jadwal-tahapan-pilkada-dan-persyaratan-calon-antisipasi-pilkada-medan-2024/>.

²⁵ Kompas Cyber Media, "Hasil Pilkada Medan Digugat ke MK, KPUD Disebut Paksakan Pemilihan di Tengah Banjir," KOMPAS.com, 9 Januari 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/09/09093441/hasil-pilkada-medan-digugat-ke-mk-kpud-disebut-paksakan-pemilihan-di-tengah>.

²⁶ "Bawaslu Kota Medan Sosialisasikan Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta Pemilihan Kepada Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan 2024 | Bawaslu," 21 Desember 2024, <http://medan.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kota-medan-sosialisasikan-penyelesaian-sengketa-antar-peserta-pemilihan-kepada>; "PHPU Walikota Medan: Partisipasi Pemilih Rendah Akibat Banjir | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," diakses 27 Januari 2025, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=22069>.

²⁷ Martha Kropf dkk., "Making Every Vote Count: The Important Role of Managerial Capacity in Achieving Better Election Administration Outcomes," *Public Administration Review* 80, no. 5 (September 2020): 733–42, <https://doi.org/10.1111/puar.13216>.

menunjukkan bahwa kapasitas lokal dalam pengelolaan bencana harus diintegrasikan dengan proses administratif pemilu untuk memastikan bahwa kondisi darurat tidak memengaruhi keadilan dan partisipasi pemilih²⁸. Dalam hal ini, Medan belum menunjukkan kesiapan administratif yang memadai untuk mengatasi tantangan tersebut²⁹.

Selain itu, sengketa hasil pemilu yang melibatkan gugatan atas keakuratan proses administrasi menyoroti pentingnya sistem penyelesaian sengketa yang transparan. Penelitian oleh Li dan Wright (2023) menunjukkan bahwa ketika sistem administratif terintegrasi dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dapat meningkat³⁰. Di Pilkada Medan, upaya Bawaslu dalam mensosialisasikan mekanisme penyelesaian sengketa merupakan langkah awal yang baik, tetapi membutuhkan penguatan lebih lanjut untuk memastikan kepercayaan publik tetap terjaga.

Kapasitas administratif yang kuat merupakan fondasi penting untuk pemilu yang adil dan transparan. Pilkada Medan 2024 menunjukkan bagaimana manajemen administratif yang baik, seperti penetapan jadwal dan verifikasi calon, dapat meningkatkan kepercayaan pada proses pemilu. Namun, kelemahan dalam penanganan kondisi darurat seperti banjir menunjukkan perlunya reformasi dalam regulasi darurat dan kesiapan teknis di tingkat lokal

Secara ilmiah, temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas administratif dalam menghadapi dinamika sosial dan lingkungan yang memengaruhi pemilu. Studi oleh El-Taliawi dan Wal (2019) menggarisbawahi perlunya kerangka kerja administratif yang fleksibel namun tetap konsisten untuk memastikan bahwa proses pemilu tetap transparan dan inklusif³¹. Penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Medan dapat memperbaiki pendekatan administratifnya dengan mengadopsi sistem yang lebih responsif terhadap tantangan lokal. Secara praktis, pemerintah daerah dan KPU perlu meningkatkan koordinasi untuk mengatasi tantangan administratif dalam pemilu mendatang. Hal ini mencakup integrasi mekanisme darurat dalam perencanaan pemilu serta pelatihan petugas pemilu untuk menangani situasi tak terduga. Selain itu, sosialisasi yang lebih luas tentang mekanisme

²⁸ Arif Setiawan dkk., "The Impact of Local Government Capacity on Public Service Delivery: Lessons Learned from Decentralized Indonesia," *Economies* 10, no. 12 (Desember 2022): 323, <https://doi.org/10.3390/economies10120323>.

²⁹ "Sidang Sengketa Pilkada Kota Medan Singgung Banjir Penyebab Partisipasi Pemilih Rendah | tempo.co," *Tempo*, 8 Januari 2025, <https://www.tempo.co/politik/sidang-sengketa-pilkada-kota-medan-singgung-banjir-penyebab-partisipasi-pemilih-rendah-1191564>; Media, "Hasil Pilkada Medan Digugat ke MK, KPUD Disebut Paksakan Pemilihan di Tengah Banjir."

³⁰ Jia Li dan Joseph Wright, "How Personalist Parties Undermine State Capacity in Democracies," *Comparative Political Studies* 56, no. 13 (1 November 2023): 2030–65, <https://doi.org/10.1177/00104140231169014>.

³¹ Ola G. El-Taliawi dan Zeger Van Der Wal, "Developing administrative capacity: an agenda for research and practice," *Policy Design and Practice* 2, no. 3 (3 Juli 2019): 243–57, <https://doi.org/10.1080/25741292.2019.1595916>.

penyelesaian sengketa akan membantu mengurangi ketegangan pasca pemilu dan meningkatkan legitimasi hasil pemilu.

Peningkatan kapasitas administratif juga membutuhkan investasi dalam teknologi dan infrastruktur, seperti sistem pemilu elektronik yang dapat mengurangi kendala logistik dan mempercepat penghitungan suara. Dengan demikian, Pilkada Medan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam memperkuat tata kelola administratif pemilu, menciptakan demokrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Hubungan Kapasitas Pelaksanaan dengan Kualitas Demokrasi Lokal

Kapasitas pelaksanaan pemilu yang mencakup dimensi ekstraktif, koersif, dan administratif memiliki dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi lokal. Dalam konteks Pilkada Medan 2024, keterlambatan pencairan anggaran hingga pertengahan tahun 2024 menunjukkan tantangan serius dalam dimensi ekstraktif, yang pada gilirannya menghambat pelaksanaan tahapan persiapan pemilu. Anggaran sosialisasi pasangan calon yang tidak dimanfaatkan optimal semakin memperburuk keterlibatan masyarakat, sehingga partisipasi pemilih hanya mencapai 34,81 persen³².

Pada dimensi koersif, upaya pengamanan yang dilakukan Polrestabes Medan dan Forkopimda Sumatera Utara menunjukkan efektivitas dalam menciptakan stabilitas politik selama pemilu. Keberhasilan dalam distribusi logistik dan pengamanan TPS meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu, meskipun tantangan berupa konflik potensi tetap ada. Dari sisi kapasitas administratif, KPU Medan berhasil mengelola tahapan seperti pendaftaran calon dan penetapan jadwal kampanye. Namun, tantangan besar muncul dalam penanganan situasi darurat seperti banjir yang memengaruhi akses ke TPS. Hal ini menunjukkan perlunya kesiapan lebih lanjut dalam mengintegrasikan manajemen risiko bencana dengan proses pemilu.

Dalam dimensi koersif, temuan di Medan sejalan dengan penelitian Kentikelenis dan Rochford³³, yang menekankan pentingnya legitimasi dalam tindakan koersif. Keberhasilan pengamanan distribusi logistik dan TPS di Medan menunjukkan bahwa langkah koersif dapat menciptakan stabilitas tanpa memicu konflik jika dilaksanakan secara transparan dan adil. Namun, penelitian oleh Noskov et al.³⁴ memperingatkan bahwa jika langkah koersif

³² “Sidang Sengketa Pilkada Kota Medan Singgung Banjir Penyebab Partisipasi Pemilih Rendah | tempo.co”; “Partisipasi Pemilih di Medan Cuman 34,81 Persen, Akademisi: Wali Kota Medan Adalah Golput - Tribun-medan.com,” diakses 26 Januari 2025, <https://medan.tribunnews.com/2024/12/10/partisipasi-pemilih-di-medan-cuman-3481-persen-akademisi-wali-kota-medan-adalah-golput>.

³³ Kentikelenis dan Rochford, “Power Asymmetries in Global Governance for Health.”

³⁴ Noskov dkk., “Politics and Law as Regulatory Correlates of Power.”

tidak adil, legitimasi negara dapat terancam. Hal ini menjadi perhatian penting bagi penyelenggara pemilu untuk menjaga keseimbangan dalam pengamanan.

Dimensi administratif menunjukkan tantangan yang lebih besar di Medan, terutama terkait kesiapan menghadapi kondisi darurat. Studi oleh Setiawan et al. menyoroti bahwa kapasitas administratif harus mencakup kemampuan mengelola situasi tak terduga seperti bencana alam. Kegagalan mengintegrasikan manajemen risiko bencana dengan proses pemilu di Medan mencerminkan kebutuhan akan perencanaan yang lebih baik untuk memastikan pemilu tetap inklusif³⁵.

Penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara kapasitas pelaksanaan dan kualitas demokrasi lokal sangat kompleks dan memerlukan intervensi multidimensi. Secara ilmiah, temuan ini mendukung literatur yang menyoroti pentingnya kapasitas fiskal, koersif, dan administratif dalam meningkatkan kualitas pemilu. Studi ini juga memperkuat argumen oleh El-Taliawi dan Wal bahwa kelemahan dalam kapasitas administratif dapat menghambat partisipasi pemilih dan legitimasi hasil pemilu, khususnya dalam situasi darurat³⁶.

Secara praktis, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan hubungan antara kapasitas pelaksanaan dan kualitas demokrasi lokal di Medan:

- a. Perencanaan Anggaran yang Proaktif: Pemerintah daerah dan KPU harus memastikan pencairan anggaran tepat waktu dan alokasi dana yang efektif untuk sosialisasi calon. Langkah ini akan meningkatkan partisipasi pemilih dan memperkuat legitimasi pemilu.
- b. Penguatan Pengamanan yang Transparan: Upaya koersif harus terus dilakukan dengan pendekatan yang adil dan transparan, seperti yang berhasil diterapkan dalam pengamanan distribusi logistik. Pelatihan tambahan bagi aparat keamanan untuk menangani potensi konflik dapat meningkatkan stabilitas tanpa mengorbankan legitimasi.
- c. Manajemen Risiko Bencana dalam Pemilu: KPU perlu mengintegrasikan manajemen risiko bencana ke dalam perencanaan pemilu untuk mengantisipasi gangguan seperti banjir. Investasi dalam infrastruktur TPS dan penyediaan alternatif untuk pemilih yang terhambat kondisi darurat adalah langkah yang diperlukan.

Secara keseluruhan, Pilkada Medan 2024 memberikan pelajaran penting bagi penyelenggara pemilu di Indonesia. Dengan mengatasi kelemahan dalam kapasitas ekstraktif, koersif, dan administratif, kualitas demokrasi lokal dapat ditingkatkan, memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan partisipasi pemilih, dan memastikan legitimasi hasil pemilu di masa depan.

³⁵ Setiawan dkk., "The Impact of Local Government Capacity on Public Service Delivery."

³⁶ El-Taliawi dan Van Der Wal, "Developing administrative capacity."

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti hubungan penting antara kapasitas pelaksanaan pemilu—meliputi kapasitas ekstraktif, koersif, dan administratif—dengan kualitas demokrasi lokal dalam konteks Pilkada Medan 2024. Kapasitas ekstraktif menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan anggaran, yang menyebabkan keterlambatan tahapan persiapan dan memengaruhi partisipasi pemilih. Di sisi lain, kapasitas koersif yang diterapkan melalui pengamanan distribusi logistik dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) berhasil menciptakan stabilitas tanpa memicu konflik. Namun, kelemahan dalam kapasitas administratif, terutama dalam manajemen situasi darurat seperti banjir, menunjukkan perlunya perbaikan dalam perencanaan dan eksekusi.

Kesimpulan utama dari studi ini adalah bahwa keterlambatan pencairan anggaran, kurangnya pemanfaatan dana sosialisasi, dan ketidaksiapan menghadapi kondisi darurat menjadi hambatan utama dalam meningkatkan partisipasi pemilih, kepercayaan publik, dan legitimasi hasil pemilu. Untuk mengatasi tantangan ini, rekomendasi meliputi perencanaan anggaran yang proaktif, penguatan pengamanan berbasis transparansi, dan integrasi manajemen risiko bencana dalam proses pemilu. Dengan memperkuat kapasitas pelaksanaan di berbagai dimensi, Pilkada Medan dapat menjadi model untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal, memastikan keadilan pemilu, dan memperkuat legitimasi proses politik di masa depan.

Referensi

- Bawaslu, 2024, “Bawaslu Kota Medan Sosialisasikan Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta Pemilihan Kepada Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan 2024 | Bawaslu,” 21 Desember 2024. <http://medan.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kota-medan-sosialisasikan-penyelesaian-sengketa-antar-peserta-pemilihan-kepada>.
- Blog Info dan Berita. “Jadwal, Tahapan Pilkada, Dan Persyaratan Calon: Antisipasi Pilkada Medan 2024,” 8 Juni 2024. <https://fahum.umsu.ac.id/blog/jadwal-tahapan-pilkada-dan-persyaratan-calon-antisipasi-pilkada-medan-2024/>.
- Curtice, Travis B., dan Brandon Behlendorf. “Street-Level Repression: Protest, Policing, and Dissent in Uganda.” *Journal of Conflict Resolution* 65, no. 1 (1 Januari 2021): 166–94. <https://doi.org/10.1177/0022002720939304>.
- El-Taliawi, Ola G., dan Zeger Van Der Wal. “Developing administrative capacity: an agenda for research and practice.” *Policy Design and Practice* 2, no. 3 (3 Juli 2019): 243–57. <https://doi.org/10.1080/25741292.2019.1595916>.

- Kentikelenis, Alexander, dan Connor Rochford. "Power Asymmetries in Global Governance for Health: A Conceptual Framework for Analyzing the Political-Economic Determinants of Health Inequities." *Globalization and Health* 15, no. Suppl 1 (28 November 2019): 70. <https://doi.org/10.1186/s12992-019-0516-4>.
- Kropf, Martha, JoEllen V. Pope, Mary Jo Shepherd, dan Zachary Mohr. "Making Every Vote Count: The Important Role of Managerial Capacity in Achieving Better Election Administration Outcomes." *Public Administration Review* 80, no. 5 (September 2020): 733–42. <https://doi.org/10.1111/puar.13216>.
- LeBas, Adrienne. "Who Trusts? Ethnicity, Integration, and Attitudes Toward Elected Officials in Urban Nigeria." *Comparative Political Studies* 53, no. 10–11 (1 September 2020): 1738–66. <https://doi.org/10.1177/0010414020912269>.
- Li, Jia, dan Joseph Wright. "How Personalist Parties Undermine State Capacity in Democracies." *Comparative Political Studies* 56, no. 13 (1 November 2023): 2030–65. <https://doi.org/10.1177/00104140231169014>.
- Media, Kompas Cyber. "Hasil Pilkada Medan Digugat ke MK, KPUD Disebut Paksakan Pemilihan di Tengah Banjir." KOMPAS.com, 9 Januari 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/09/09093441/hasil-pilkada-medan-digugat-ke-mk-kpud-disebut-paksakan-pemilihan-di-tengah>.
- . "Tegur Bobby Nasution, Mendagri Soroti Anggaran Pilkada Medan Belum Cair Rp 83 Miliar." KOMPAS.com, 9 Juli 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/09/12312741/tegur-bobby-nasution-mendagri-soroti-anggaran-pilkada-medan-belum-cair-rp-83>.
- Mithia, Catherine, dan Margaret Kosgey. "Governance Practices and Illicit Financial Flows in Kenya's Oil and Mining Sectors." *American Journal of Public Policy and Administration* 7, no. 1 (1 November 2022): 1–13. <https://doi.org/10.47672/ajppa.1049>.
- Noskov, Vladimir A., Vladislav Yu Turanin, Nasrudi U. Yarychev, Irina A. Baghdasaryan, dan Vera P. Kutina. "Politics and Law as Regulatory Correlates of Power." *Revista de Investigaciones Universidad Del Quindío* 34, no. S2 (1 September 2022): 337–43. <https://doi.org/10.33975/riuq.vol34nS2.949>.
- "Partisipasi Pemilih di Medan Cuman 34,81 Persen, Akademisi: Wali Kota Medan Adalah Golput - Tribun-medan.com." Diakses 26 Januari 2025. <https://medan.tribunnews.com/2024/12/10/partisipasi-pemilih-di-medan-cuman-3481-persen-akademisi-wali-kota-medan-adalah-golput>.

- “Personel Polsek Medan Baru Pengamanan dan Pengawasan Pendistribusian Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 – Tribra News Polrestabes Medan.” Diakses 27 Januari 2025. <https://tribranews.restabesmedan.sumut.polri.go.id/personel-polsek-medan-baru-pengamanan-dan-pengawasan-pendistribusian-logistik-pilkada-serentak-tahun-2024/>.
- MKRI, “PHPU Walikota Medan: Partisipasi Pemilih Rendah Akibat Banjir | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” Diakses 27 Januari 2025. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=22069>.
- medandaily, “Terima Anggaran Penuh Sebesar Rp82 M, KPU Medan Ajak Media Sukseskan Pilkada 2024.” *MedanDaily.com* (blog), 12 Juli 2024. <https://medandaily.com/politik/terima-anggaran-penuh-sebesar-rp82-m-kpu-medan-ajak-media-sukseskan-pilkada-2024/>.
- Ricciuti, Roberto, Antonio Savoia, dan Kunal Sen. “What Determines Administrative Capacity in Developing Countries?” *International Tax and Public Finance* 26, no. 5 (1 Oktober 2019): 972–98. <https://doi.org/10.1007/s10797-019-09535-y>.
- Rmol.id. “Anggaran Iklan Rp 1,8 M Tak Disentuh, KPU Medan ‘Hilangkan’ Hak Paslon.” Diakses 27 Januari 2025. <https://rmol.id/politik/read/2024/11/17/645096/anggaran-iklan-rp-1-8-m-tak-disentuh-kpu-medan-hilangkan-hak-paslon>.
- Setiawan, Arif, Prijono Tjiptoherijanto, Benedictus Raksaka Mahi, dan Khoirunurrofik Khoirunurrofik. “The Impact of Local Government Capacity on Public Service Delivery: Lessons Learned from Decentralized Indonesia.” *Economies* 10, no. 12 (Desember 2022): 323. <https://doi.org/10.3390/economies10120323>.
- Setyowati, Milla, Aldy Widiarto, dan Indriani Indriani. “Development of DKI Jakarta Regional Fiscal Capacity in 2014-2019,” 2020. <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.5-8-2020.2301220>.
- Sitepu, Suyanto. “Anggaran Pilkada Medan Cair Pekan Depan.” *rri.co.id* - Portal berita terpercaya. Diakses 27 Januari 2025. <https://rri.co.id/pilkada-2024/808699/anggaran-pilkada-medan-cair-pekan-depan>.
- Smidt, Hannah. “Mitigating election violence locally: UN peacekeepers’ election-education campaigns in Côte d’Ivoire.” *Journal of Peace Research* 57, no. 1 (2020): 199–216.
- Sumutpos.co, Redaksi. “KPU Medan Distribusikan Logistik Pilkada ke 21 Kecamatan dan 151 Kelurahan - Sumut Pos.” KPU Medan Distribusikan Logistik Pilkada ke 21 Kecamatan dan 151 Kelurahan - Sumut Pos. Diakses 27 Januari 2025.

<https://sumutpos.jawapos.com/politik/2375349395/kpu-medan-distribusikan-logistik-pilkada-ke-21-kecamatan-dan-151-kelurahan>.

Tempo. “Sidang Sengketa Pilkada Kota Medan Singgung Banjir Penyebab Partisipasi Pemilih Rendah | tempo.co,” 8 Januari 2025.

<https://www.tempo.co/politik/sidang-sengketa-pilkada-kota-medan-singgung-banjir-penyebab-partisipasi-pemilih-rendah-1191564>.

Waspada Online. “Pilkada Medan 2024: Ini Jadwal Dan Lokasi Kampanye Terbuka Cawalkot Medan,” 16 Oktober 2024.

<https://www.waspada.co.id/pilkada-medan-2024-ini-jadwal-dan-lokasi-kampanye-terbuka-cawalkot-medan/>.

Waspada Online. “Targetkan Tiga Hari Selesai, KPU Medan Mulai Distribusikan Logistik Pilkada 2024,” 23 November 2024.

<https://www.waspada.co.id/targetkan-tiga-hari-selesai-kpu-medan-mulai-distribusikan-logistik-pilkada-2024/>.